

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Air merupakan kebutuhan mendasar bagi kehidupan manusia yang tidak dapat digantikan oleh sumber daya apapun. Pemenuhan hak atas air bersih telah diakui secara internasional melalui Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 64/292 Tahun 2010 yang menegaskan bahwa akses terhadap air bersih dan sanitasi merupakan hak asasi manusia. Di Indonesia, jaminan atas hak tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) yang mengamanatkan penguasaan negara atas sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Namun kenyataannya, pemenuhan hak atas air bersih masih menghadapi tantangan serius di berbagai wilayah pesisir Indonesia akibat intrusi air laut dan penurunan kualitas air tanah (Putra et al., 2023).

Desa Banjarsari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak merupakan salah satu desa pesisir yang menghadapi krisis air minum secara nyata. Berdasarkan temuan lapangan, sumber air di desa ini merupakan air permukaan berupa embung atau penampung air hujan. Ketika terjadi banjir rob yang intensitasnya semakin meningkat, penampungan air hujan yang seharusnya menghasilkan air tawar menjadi terkontaminasi air laut sehingga berasa asin dan tidak layak konsumsi. Sebelum adanya program desalinasi, warga mengandalkan pembelian air isi ulang dari luar desa untuk kebutuhan minum dan memasak, sementara kebutuhan mandi dan mencuci dipenuhi dari sumur bor yang kapasitasnya sangat terbatas, terutama di musim kemarau. Kondisi ini menggambarkan kerentanan akses air minum yang berdampak langsung pada kualitas hidup dan beban ekonomi masyarakat pesisir.

Fenomena krisis air bersih di wilayah pesisir Kabupaten Demak dalam beberapa tahun terakhir semakin menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan dan membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak. Kecamatan Sayung sebagai kawasan pesisir utara Jawa mengalami dampak

berlapis berupa banjir rob, intrusi air laut, dan penurunan muka tanah yang secara simultan menyebabkan kualitas air tanah terus menurun hingga tidak layak konsumsi. (Trihatmoko et al., 2020) menunjukkan bahwa intrusi air laut di wilayah pesisir Demak telah memasuki lapisan akuifer dangkal pada kedalaman 0–30 meter dan secara langsung memengaruhi kualitas air tanah yang digunakan masyarakat sehari-hari. Lebih jauh, (Khairullah et al., 2024) menemukan bahwa luas genangan rob di Kecamatan Sayung telah mencapai lebih dari 1.266 hektar akibat kombinasi kenaikan muka air laut dan penurunan muka tanah yang terus berlangsung. Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat bahkan menegaskan bahwa kondisi di Sayung, Demak bukan lagi sekadar banjir rob melainkan krisis struktural yang menyebabkan hilangnya daratan dan ruang hidup masyarakat secara perlahan, di mana data BRIN mencatat 65,8 persen garis pantai Pantura mengalami erosi sepanjang 2000 sampai 2024. Di wilayah Demak sendiri, air laut tercatat telah masuk hingga 5 sampai 6 kilometer ke daratan dan menenggelamkan kawasan permukiman dan lahan pertanian. Situasi ini mempertegas bahwa krisis air bersih di Desa Banjarsari bukan persoalan teknis semata, melainkan merupakan dampak akumulatif dari tekanan ekologis dan perubahan lingkungan yang semakin kompleks dan tidak dapat ditangani oleh pemerintah desa secara mandiri.

Keterbatasan akses air bersih tersebut berdampak langsung pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Sebelum adanya fasilitas desalinasi, masyarakat Desa Banjarsari terpaksa mengandalkan pembelian air isi ulang dari luar desa untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari dengan biaya yang membebani rumah tangga berpenghasilan rendah (Tsabita Naja, 2025). Persoalan ini memperlihatkan bahwa keterbatasan akses air bersih tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan, tetapi juga memperparah beban ekonomi rumah tangga pesisir yang sudah rentan. Kondisi ini semakin diperparah oleh fakta bahwa sumur-sumur warga di kawasan pesisir Kecamatan Sayung juga terdampak intrusi air laut akibat perubahan gelombang laut yang dipicu berbagai intervensi pembangunan di wilayah tersebut. Dalam konteks inilah penyediaan air minum yang layak dan terjangkau menjadi isu pelayanan publik yang mendesak dan memerlukan

intervensi lintas sektor yang terkoordinasi. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi pun menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan air bersih merupakan salah satu indikator penting dalam penanganan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat pesisir (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak, 2025), sehingga persoalan ini tidak lagi dapat diselesaikan melalui pendekatan sektoral yang terfragmentasi.

Kepala Desa Banjarsari, Bapak Haryanto , menggambarkan kondisi ini dalam wawancara penelitian permasalahan utama yang diidentifikasi sejak awal kepemimpinannya pada akhir tahun 2022 adalah keterbatasan akses air bersih. Upaya yang telah dilakukan pemerintah desa melalui dana desa untuk pengeboran sumur air tanah pun tidak sepenuhnya mengatasi masalah, karena pada musim kemarau kapasitas sumur bor menurun drastis dan desa sempat menerima bantuan air dari PMI dan BPBD selama lima bulan berturut-turut.

Keterangan Kepala Desa Banjarsari tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa telah melakukan berbagai upaya awal untuk mengatasi keterbatasan air bersih, namun upaya tersebut belum mampu menyelesaikan persoalan secara berkelanjutan. Penggunaan dana desa untuk pengeboran sumur air tanah memperlihatkan adanya inisiatif lokal dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Akan tetapi, menurunnya kapasitas sumur bor sering mengalami masalah atau sering rusak serta ketergantungan desa terhadap bantuan air dari PMI dan BPBD selama beberapa bulan menunjukkan bahwa kapasitas pemerintah desa masih terbatas dalam menghadapi krisis air bersih yang bersifat berulang dan kompleks. Kondisi ini sejalan dengan kajian (Radityorini et al., 2020) yang menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya air bersih di wilayah pesisir memerlukan tata kelola kolaboratif karena pemerintah tidak selalu mampu menyelesaikan persoalan pelayanan dasar secara mandiri.

Selain itu, pengalaman Desa Banjarsari menunjukkan bahwa krisis air bersih bukan hanya menyangkut ketersediaan sarana fisik, tetapi juga berkaitan dengan keberlanjutan pelayanan publik. Bantuan air bersih dari lembaga kebencanaan dapat membantu masyarakat dalam jangka pendek,

namun belum menjawab kebutuhan air minum yang stabil, layak, dan terjangkau dalam jangka panjang. Penelitian mengenai collaborative governance dalam program air bersih di Nagari Tluk Amplu Inderapura juga menunjukkan bahwa keberhasilan penyediaan air bersih dipengaruhi oleh keterlibatan berbagai pihak serta adanya faktor pendukung dan penghambat dalam proses kolaborasi. Hal ini memperkuat pandangan bahwa penyediaan air bersih membutuhkan koordinasi lintas aktor, bukan hanya intervensi teknis dari satu lembaga (Silviani & Eriyanti, 2023).

Dalam konteks tersebut, program desalinasi di Desa Banjarsari dapat dipahami sebagai respons terhadap keterbatasan pemerintah desa dalam menyediakan solusi air bersih yang berkelanjutan. Keterlibatan pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga pendukung, dan masyarakat menjadi penting karena masing-masing aktor memiliki peran, sumber daya, dan kapasitas yang berbeda. Kajian (Mutiarawati & Sudarmo, 2021) tentang *collaborative governance* dalam penanganan rob di wilayah pesisir juga menunjukkan bahwa persoalan pesisir yang kompleks membutuhkan keterlibatan para pemangku kepentingan dalam proses penyelesaian masalah. Dengan demikian, pendekatan *collaborative governance* menjadi relevan untuk menjelaskan bagaimana program desalinasi di Desa Banjarsari dirancang, dilaksanakan, dan dikelola melalui kerja sama lintas aktor.

Keterbatasan kapasitas pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan pelayanan dasar mendorong munculnya pendekatan kolaboratif sebagai alternatif tata kelola yang lebih efektif (Agung, 2025). Dalam konteks keterbatasan kapasitas pemerintah daerah untuk mengatasi krisis air minum secara mandiri, pendekatan collaborative governance menjadi relevan sebagai alternatif tata kelola. (Ansell & Gash, 2008) mendefinisikan collaborative governance sebagai pengaturan tata kelola di mana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non pemerintah dalam proses pengambilan keputusan yang bersifat formal, konsensus berorientasi, dan deliberatif, dengan tujuan membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik. Dalam kerangka inilah program desalinasi di Desa Banjarsari dapat dipahami: sebagai wujud nyata kolaborasi

antara pemerintah daerah dan Universitas Diponegoro (UNDIP) yang membawa kapasitas teknis akademis ke dalam penyelesaian persoalan pelayanan publik.

Penerapan collaborative governance di Indonesia telah dikaji dalam berbagai konteks pelayanan publik dan menunjukkan bahwa kolaborasi multipihak mampu mengisi keterbatasan kapasitas pemerintah dalam mengatasi persoalan sosial yang kompleks (Niki et al., 2020). Keterlibatan UNDIP dalam program desalinasi bermula dari kolaborasi dengan pemerintah Australia melalui Program Koneksi yang menghubungkan para pendidik Indonesia dengan peneliti Australia. Dari program tersebut, UNDIP membangun satu unit desalinasi di Kampus UNDIP Jepara sebagai model awal. Keberhasilan model ini kemudian mendorong Rektor UNDIP untuk menjadikan desalinasi sebagai bagian dari tagline kelembagaan "UNDIP Bermartabat dan UNDIP Bermanfaat", khususnya dalam program penuntasan kemiskinan dan ketahanan pangan. Pada tahun 2025, melalui perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan UNDIP, dibangun delapan unit desalinasi di berbagai titik pesisir Jawa Tengah, salah satunya di Desa Banjarsari yang didanai oleh BPD Jawa Tengah.

Kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi dalam inovasi pelayanan publik merupakan praktik yang semakin berkembang di Indonesia sebagai respons terhadap tuntutan reformasi tata kelola yang lebih adaptif dan berbasis bukti (Nugraha & Madya, 2023). Program desalinasi Desa Banjarsari menjadi kasus yang menarik untuk dikaji karena melibatkan kolaborasi multipihak yang kompleks: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai koordinator kebijakan, BPD Jawa Tengah sebagai penyandang dana, Dinas PU Cipta Karya Provinsi sebagai pengawas teknis, UNDIP sebagai perancang dan pendamping teknologi, Pemerintah Desa Banjarsari sebagai penyedia lahan, dan masyarakat melalui Kelompok Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS) sebagai pengelola dan penerima manfaat. Kompleksitas aktor ini menjadikan kasus ini sebagai laboratorium empiris yang kaya untuk menganalisis dimensi Collaborative Process dari teori Ansell dan Gash. Penelitian ini hadir untuk mengisi

kekosongan kajian mengenai kolaborasi pemerintah-perguruan tinggi dalam inovasi layanan air minum di wilayah pesisir Indonesia.

1.2 Perumusan Masalah

Bagaimana kolaborasi antara pemerintah daerah dan Universitas Diponegoro dalam upaya penyediaan air minum melalui teknologi desalinasi di Desa Banjarsari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mendeskripsikan secara mendalam kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan Universitas Diponegoro dalam penyediaan air minum melalui teknologi desalinasi di Desa Banjarsari, dengan fokus pada lima sub-dimensi Collaborative Process dari teori (Ansell & Gash, 2008) face-to-face dialogue, trust building, commitment to process, shared understanding, dan intermediate outcomes. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat, mekanisme kerja sama yang dibangun, peran masing-masing pihak, serta hasil yang dicapai bagi peningkatan akses air minum masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian Ilmu Pemerintahan, khususnya dalam bidang collaborative governance dan pelayanan publik berbasis kolaborasi lintas sektor. Hasil penelitian memperkaya penerapan model (Ansell & Gash, 2008) dalam konteks kolaborasi pemerintah daerah–perguruan tinggi di Indonesia pada sektor pelayanan dasar.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini menjadi referensi bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Demak dalam merancang kebijakan kolaboratif yang lebih efektif. Bagi UNDIP, penelitian ini menjadi evaluasi dan masukan dalam pengembangan model pengabdian masyarakat berbasis teknologi. Bagi pengelola dan masyarakat Desa Banjarsari, penelitian ini

memberikan dokumentasi tertulis yang berguna untuk pengembangan program ke depan.

1.5 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu menjadi acuan dan komparasi dalam penelitian ini. Pertama, penelitian Silviani dan Eriyanti (2023) berjudul “Faktor Pendukung dan Penghambat Collaborative Governance dalam Pelaksanaan Program Air Bersih di Nagari Tluk Amplu Inderapura” menunjukkan bahwa keberhasilan penyediaan air bersih dipengaruhi oleh keterlibatan berbagai pihak serta adanya faktor pendukung dan penghambat dalam proses kolaborasi. Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada identifikasi faktor-faktor kolaborasi secara umum, sedangkan penelitian ini menekankan pada mekanisme kolaborasi pemerintah dalam program desalinasi berbasis teknologi perguruan tinggi.

Kedua, penelitian Mutiarawati dan Sudarmo (2021) berjudul “Collaborative Governance dalam Penanganan Rob di Kelurahan Bandengan Kota Pekalongan” menunjukkan bahwa persoalan pesisir yang kompleks membutuhkan keterlibatan para pemangku kepentingan dalam proses penyelesaian masalah. Persamaannya, kedua penelitian sama-sama mengkaji collaborative governance di wilayah pesisir. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian: Mutiarawati dan Sudarmo mengkaji penanganan banjir rob, sementara penelitian ini mengkaji penyediaan air minum melalui teknologi desalinasi.

Ketiga, penelitian Niki et al. (2020) berjudul “Collaborative Governance in Poverty Alleviation in Ngada Regency” menunjukkan bahwa kolaborasi multipihak mampu mengisi keterbatasan kapasitas pemerintah dalam mengatasi persoalan sosial yang kompleks. Penelitian ini menjadi acuan karena menunjukkan bahwa model collaborative governance relevan diterapkan dalam konteks pelayanan dasar masyarakat di Indonesia, termasuk penyediaan air minum sebagaimana yang dikaji dalam penelitian ini.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Collaborative Governance

(Ansell & Gash, 2008) mendefinisikan collaborative governance sebagai: "*a governing arrangement where one or more public agencies directly engage non-state stakeholders in a collective decision-making process that is formal, consensus-oriented, and deliberative and that aims to make or implement public policy or manage public programs or assets.*" Definisi ini menegaskan bahwa collaborative governance mensyaratkan keterlibatan langsung lembaga publik bersama aktor non-pemerintah dalam proses yang formal, berorientasi konsensus, dan deliberatif. Kerangka teori Ansell dan Gash telah banyak digunakan dalam penelitian collaborative governance di Indonesia, termasuk dalam kajian penanganan kemiskinan dan pelayanan dasar di berbagai daerah (Niki et al., 2020).

Model analitik Ansell dan Gash terdiri dari empat komponen yang saling berinteraksi: Starting Conditions (kondisi awal), Institutional Design (desain kelembagaan), Facilitative Leadership (kepemimpinan fasilitatif), dan Collaborative Process (proses kolaboratif). Penelitian ini memfokuskan analisis pada dimensi Collaborative Process yang merupakan inti dari seluruh kerangka, terdiri dari lima sub-dimensi yang bersifat sirkular dan saling memperkuat:

1. *Face-to-face Dialogue*: Dialog tatap muka merupakan fondasi proses kolaboratif. Tanpa interaksi langsung yang bermakna antar aktor, kolaborasi tidak dapat berkembang secara deliberatif. Dialog langsung memungkinkan para aktor saling memahami perspektif, membangun relasi personal, dan meletakkan dasar saling pengertian.
2. *Trust Building*: Kepercayaan dibangun secara gradual melalui interaksi yang konsisten, pemenuhan komitmen, dan transparansi informasi. Kepercayaan bukan prasyarat sebelum kolaborasi, melainkan tumbuh selama proses kolaborasi berlangsung.
3. *Commitment to Process*: Komitmen mencakup kesediaan nyata para aktor untuk terus terlibat meskipun ada kendala, diwujudkan melalui

alokasi sumber daya riil: waktu, anggaran, dan personel yang berdedikasi.

4. *Shared Understanding*: Kesepakatan kolektif mengenai definisi masalah, tujuan, pembagian peran, dan nilai bersama. Terdiri dari dimensi kognitif (kesepahaman faktual) dan normatif (kesepakatan nilai) yang keduanya harus terpenuhi agar kolaborasi berjalan searah.
5. *Intermediate Outcomes*: Pencapaian konkret selama proses berlangsung yang berfungsi sebagai "small wins" untuk memelihara momentum, membuktikan manfaat kolaborasi, dan memperkuat komitmen seluruh aktor.

1.6.2 Relevansi Teori dengan Penelitian

Teori Collaborative Process Ansell dan Gash dipilih karena dirancang untuk menganalisis kolaborasi lintas sektor antara lembaga publik dan aktor non-pemerintah persis kondisi yang terjadi dalam program desalinasi Desa Banjarsari. Kelima sub-dimensinya memiliki indikator yang dapat dioperasionalkan dan diverifikasi melalui data empiris wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori ini juga memperhatikan faktor penghambat dan pendorong, memberikan ruang analisis yang seimbang dan kritis (Lolkary & Laurens, 2024).

1.7 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dibangun untuk mengarahkan fokus analisis pada mekanisme kolaborasi pemerintah dalam penyediaan air minum melalui teknologi desalinasi. Titik awal kerangka ini adalah permasalahan struktural di Desa Banjarsari berupa keterbatasan akses air minum akibat intrusi air laut dan banjir rob yang melebihi kapasitas pemerintah desa untuk ditangani secara mandiri.

Keterbatasan kapasitas tersebut mendorong terbentuknya kolaborasi multipihak yang melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai koordinator kebijakan, Universitas Diponegoro sebagai penyedia teknologi, BPD Jawa Tengah sebagai pendukung pendanaan, Pemerintah Desa

Banjarsari sebagai fasilitator lokal, dan KPSPAMS sebagai pengelola operasional. Kolaborasi ini dianalisis menggunakan kerangka Collaborative Process dari Ansell dan Gash (2008) yang mencakup lima sub-dimensi: face-to-face dialogue, trust building, commitment to process, shared understanding, dan intermediate outcomes. Output dari proses kolaborasi ini adalah tersedianya air minum yang lebih layak dan terjangkau bagi masyarakat pesisir Desa Banjarsari sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan dasar.

1.8 Operasional Konsep

Operasional konsep dalam penelitian ini merujuk pada penjabaran indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur dan menganalisis dimensi Collaborative Process dari teori (Ansell & Gash, 2008). Tabel berikut menyajikan operasionalisasi konsep yang digunakan sebagai panduan analisis dalam penelitian ini.

Tabel 1. 1 Tabel Operasional Konsep

Variabel	Sub-Variabel	Indikator	Sumber Data
Collaborative Process (Ansell & Gash, 2008)	Face-to-face Dialogue	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mekanisme dan frekuensi forum koordinasi 2. Inklusivitas semua aktor terlibat 3. Komunikasi informal (WA Group, telepon) 	Wawancara, Observasi, Dokumentasi
	Trust Building	<ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi membangun kepercayaan masyarakat 2. Transparansi hasil uji 	Wawancara mendalam

		laboratorium 3. Momen kunci pembangunan kepercayaan	
	Commitment to Process	1. Dokumen formal (MoU, SK Kepala Desa) 2. Pendanaan eksternal dan subsidi 3. Pelatihan dan pendampingan pasca peresmian	Wawancara, Dokumentasi
	Shared Understanding	1. Pembagian peran yang disepakati 2. Tujuan program yang dipahami bersama 3. Nilai dan prinsip bersama	Wawancara, Dokumentasi
	Intermediate Outcomes	1. Kapasitas produksi dan kualitas air 2. Kondisi keuangan pengelola 3. Adopsi masyarakat dan hambatan	Wawancara, Observasi

		4. Tingkat kemandirian pengelola	
--	--	----------------------------------	--

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif melalui strategi studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami makna, proses, dan dinamika interaksi antar aktor dalam program desalinasi secara mendalam dan kontekstual. Studi kasus digunakan sebagai strategi penelitian karena memungkinkan peneliti mengeksplorasi fenomena yang kompleks secara mendalam dalam konteks kehidupan nyata serta memanfaatkan berbagai sumber data untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif (Mtisi, 2022). Kasus yang dipilih adalah kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan Universitas Diponegoro dalam program desalinasi di Desa Banjarsari, yang merupakan kasus unik dengan kekayaan konteks empiris..

1.9.2 Situs Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Desa Banjarsari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Lokasi ini dipilih karena merupakan kawasan pesisir yang mengalami persoalan intrusi air laut secara signifikan sehingga berdampak pada menurunnya kualitas air tanah dan keterbatasan akses masyarakat terhadap air bersih. Kecamatan Sayung diketahui menjadi salah satu wilayah pesisir di Kabupaten Demak yang paling terdampak banjir rob, penurunan muka tanah, dan penyusupan air laut yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian sumber air masyarakat menjadi payau bahkan asin sehingga tidak layak digunakan sebagai sumber air minum (Trihatmoko et al., 2020). Selain itu, penelitian (Khairullah et al., 2024) menunjukkan bahwa luas genangan rob di Kecamatan Sayung terus mengalami peningkatan akibat kombinasi kenaikan muka air laut dan penurunan muka

tanah. Situasi ini menjadikan Desa Banjarsari sebagai lokasi yang relevan untuk mengkaji persoalan pelayanan air bersih di wilayah pesisir serta upaya penanganannya melalui pendekatan kolaboratif.

Desa Banjarsari juga dipilih karena menjadi salah satu lokasi implementasi program desalinasi air hasil kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Universitas Diponegoro (UNDIP). Program ini melibatkan berbagai aktor, mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah desa, perguruan tinggi, lembaga pendanaan, hingga masyarakat lokal sebagai pengelola program. Keterlibatan banyak pemangku kepentingan tersebut menjadikan Desa Banjarsari sebagai situs yang sesuai untuk menganalisis praktik *collaborative governance* dalam penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya pada sektor penyediaan air bersih di wilayah pesisir. Selain itu, keberadaan instalasi desalinasi yang telah beroperasi memungkinkan peneliti memperoleh data empiris mengenai proses kolaborasi, pembagian peran antaraktor, mekanisme pengelolaan, serta respons masyarakat terhadap program tersebut. Program desalinasi di Desa Banjarsari sendiri merupakan bagian dari kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Universitas Diponegoro dalam penyediaan air bersih bagi masyarakat pesisir yang mengalami krisis air akibat intrusi air laut (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak, 2025).

Pemilihan lokasi penelitian juga mempertimbangkan aspek aksesibilitas dan ketersediaan data penelitian. Desa Banjarsari dapat dijangkau secara efisien untuk pelaksanaan observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan para informan penelitian. Selain penelitian lapangan di Desa Banjarsari, pengumpulan data juga dilakukan di beberapa instansi terkait, seperti Pemerintah Kabupaten Demak, Pemerintah Desa Banjarsari, serta Universitas Diponegoro sebagai pihak yang terlibat dalam perancangan dan pendampingan teknologi desalinasi. Dengan demikian, situs penelitian ini dinilai mampu memberikan informasi yang komprehensif mengenai dinamika *collaborative governance* dalam program desalinasi air di kawasan pesisir Kabupaten Demak.

1.9.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian dipilih secara *purposive sampling* berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan terhadap program. Untuk informan dari unsur masyarakat, pemilihan warga dilakukan berdasarkan keterwakilan wilayah RT, yaitu dari RT yang termasuk dalam area aktif penggunaan air desalinasi (RT 1–RT 15 Dusun Mbrangsong) dan RT yang belum aktif menggunakan air desalinasi, guna mendapatkan perspektif yang berimbang. Sepuluh informan yang diwawancarai, terdiri dari tiga informan kunci dari unsur lembaga dan tujuh informan dari unsur masyarakat, yaitu:

- Prof. I Nyoman Widiasta Koordinator Tim Teknis Desalinasi UNDIP (Departemen Teknik Lingkungan)
- Bapak Haryanto Kepala Desa Banjarsari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak
- Bapak Ahmad Bahrudin Ketua KPSPAMS (Kelompok Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi) Desa Banjarsari
- Ibu Ana Warga Desa Banjarsari, pengguna aktif air desalinasi
- Ibu Asih Warga Desa Banjarsari, belum menggunakan air desalinasi
- Ibu Rina Warga Desa Banjarsari, RT 2, pengguna aktif air desalinasi
- Bapak Marsono Warga Desa Banjarsari, RT 3, belum menggunakan air desalinasi secara rutin
- Ibu Wati Warga Desa Banjarsari, RT 4, pengguna kadang-kadang dengan pertimbangan harga
- Mas Fajar Warga Desa Banjarsari, RT 7, buruh pabrik dengan keterbatasan waktu akses layanan
- Ibu Ningsih Warga Desa Banjarsari, RT 8, pengguna aktif yang mengutamakan kemudahan layanan antar

1.9.4 Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur dengan kelima informan menggunakan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan sub-dimensi Collaborative Process, observasi non-partisipatif terhadap kondisi unit desalinasi, kios air, dan interaksi pengelola dengan

warga, dan studi dokumentasi terhadap dokumen MoU, SK Kepala Desa, laporan pendampingan, dan referensi kebijakan terkait.

1.9.5 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap dan berulang sejak proses pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan. Terdapat empat tahap utama dalam proses analisis ini. Pertama, reduksi data, yaitu proses memilah, memusatkan perhatian, dan menyederhanakan data mentah yang diperoleh dari lapangan agar relevan dengan fokus penelitian. Kedua, penyajian data, yaitu penyusunan informasi yang telah direduksi ke dalam bentuk narasi, tabel, atau bagan yang memudahkan penarikan kesimpulan. Ketiga, triangulasi, yaitu pengecekan keabsahan data dengan cara membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan konsistensi dan keakuratan temuan. Keempat, penarikan kesimpulan, yaitu proses menyimpulkan makna dari data yang telah disajikan dan diverifikasi berdasarkan kerangka teori collaborative governance Ansell dan Gash. Proses analisis dilakukan secara reflektif dan mendalam agar menghasilkan pemahaman yang komprehensif terhadap dinamika kolaborasi dalam program desalinasi Desa Banjarsari (Byrne, 2022).